RAPAT DENGAR PENDAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOMISI XI

Direktorat Jenderal Pajak

07 Mei 2025

Update Penerimaan Pajak dan SPT Tahunan

1. Kinerja Penerimaan Pajak 2020 -2024
2. Update Penerimaan Pajak s.d. Maret 2025
3. Update Penerimaan Per Jenis dan Per Sektor
4. Update Pelaporan SPT Tahunan

Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2020 – 2024

Tahun 2020 kontraksi -19,6% akibat pandemi COVID-19

Tahun 2021 tumbuh 19,3% seiring pemulihan ekonomi dan harga komoditas

Tahun 2022 tumbuh 34,3% ditopang oleh *commodity boom* dan implementasi UU HPP terutama penyesuaian tarif PPN dan PPS

Tahun 2023 melambat 8,8% karena penurunan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan kebijakan 2022 yang tidak berulang (PPS)

Tahun 2024, pencapaian target Perpajakan yang tumbuh 3,5% menghadapi **tantangan** di tengah moderasi harga komoditas

APBN TA 2025
Perpajakan diperkirakan tumbuh 13,3% didukung oleh kelanjutan reformasi perpajakan

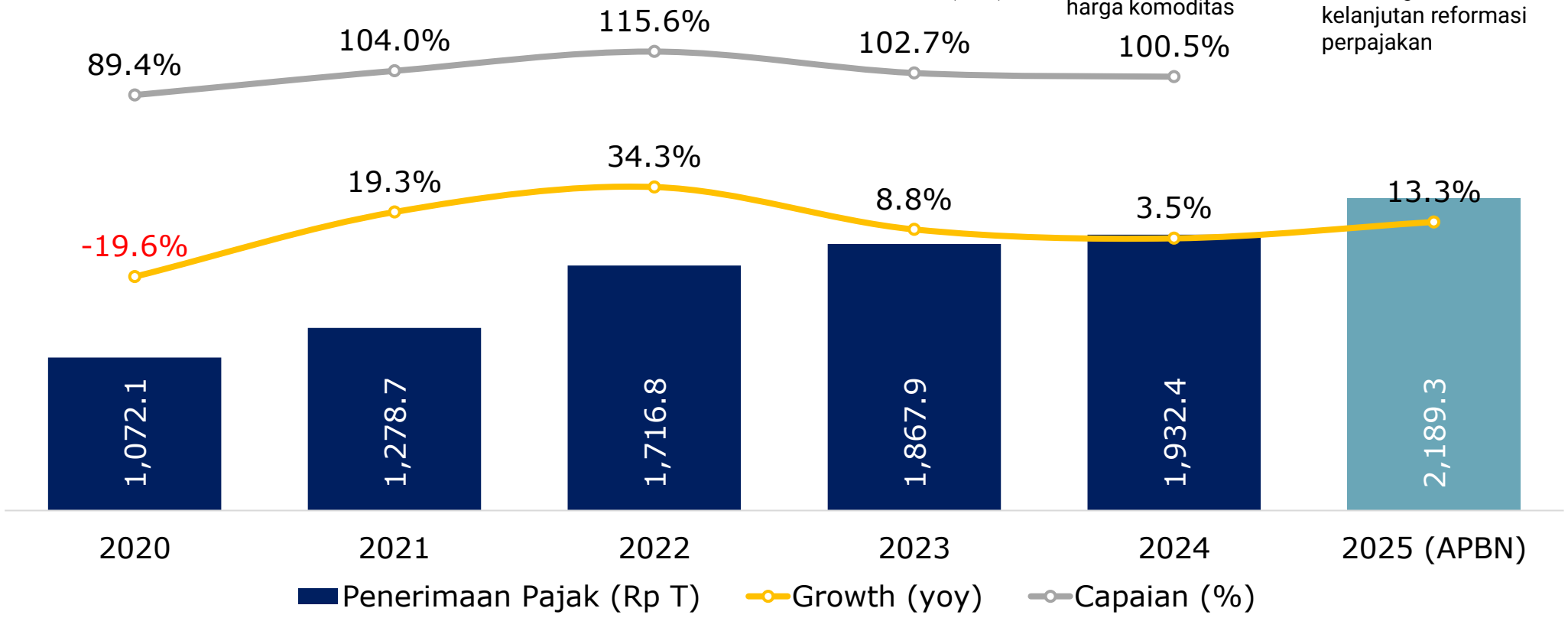

- Pada 4 tahun terakhir, penerimaan pajak dapat mencapai target dengan pertumbuhan yang sangat baik ditopang oleh pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan pajak.

Postur APBN Tetap Sesuai UU APBN No 62 Tahun 2024 Realisasi s.d. 31 Maret 2025

Uraian (triliun rupiah)

	2025			
	APBN	Real s.d. 28 Feb	Real s.d. 31 Mar	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	**3005.1**	**316.9**	**516.1**	**17.2**
I. Penerimaan Perpajakan	2490.9	240.4	400.1	16.1
1. Penerimaan Pajak	2189.3	187.8	322.6	14.7
2. Kepabeanan & Cukai	301.6	52.6	77.5	25.7
II. PNBP	513.6	76.4	115.9	22.6
B. BELANJA NEGARA	**3621.3**	**348.1**	**620.3**	**17.1**
I. Belanja Pemerintah Pusat	2701.4	211.5	413.2	15.3
1. Belanja K/L	1160.1	83.6	196.1	16.9
2. Belanja non-K/L	1541.4	127.9	217.1	14.1
II. Transfer Ke Daerah	919.9	136.6	207.1	22.5
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**-63.3**	**48.1**	**17.5**	**-27.7**
D. SURPLUS/ (DEFISIT)	**-616.2**	**-31.2**	**-104.2**	**16.9**
% thd PDB	**-2.53**	**-0.13**	**-0.43**	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**616.2**	**220.1**	**250.0**	**40.6**

PENERIMAAN PAJAK BRUTO S.D. MARET 2025 SEBESAR RP 467,0 T

Penerimaan pajak bruto bulan Maret tumbuh positif, menunjukkan pembalikan tren 2 bulan sebelumnya yang terkontraksi

Rata-rata:
Rp 146,1 T

Rata-rata:
Rp 167,0 T

Rata-rata:
Rp 174,1 T

Rata-rata:
Rp 179,0 T

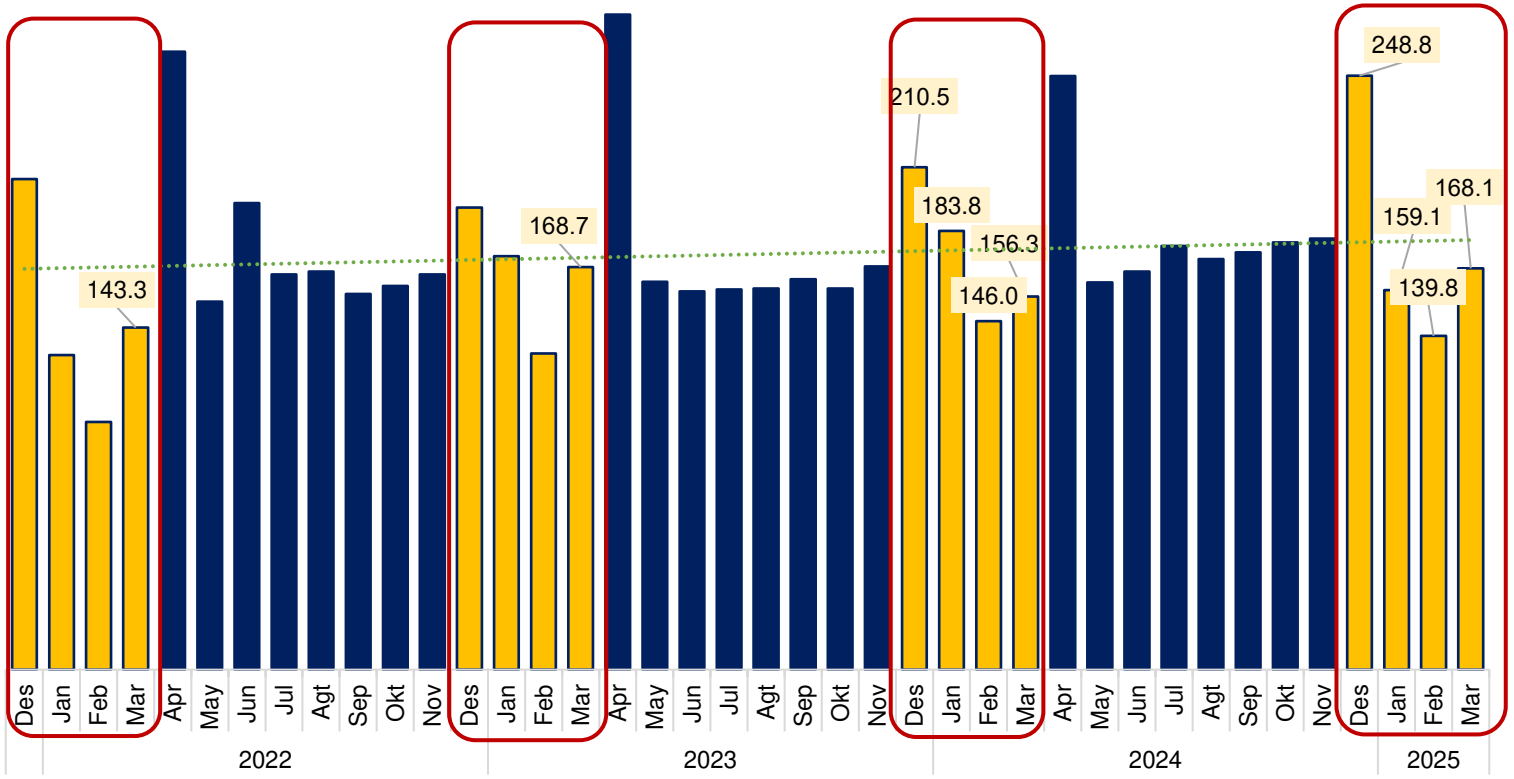

Penerimaan pajak memiliki tren bulanan yang spesifik, salah satunya adalah pada saat pergantian tahun.Penerimaan akan meningkat pada bulan Desember (efek Nataru dan akhir tahun anggaran) yang kemudian menurun pada bulan Januari dan Februari, selanjutnya akan meningkat pada bulan Maret.

Penerimaan pada bulan Januari dan Februari mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh penurunan PPh 21 sebagai dampak implementasi TER dan peningkatan restitusi.

Kinerja penerimaan pajak bulan Maret menunjukkan perbaikan dibanding bulan Januari dan Februari serta telah mencatatkan pertumbuhan positif.

Reformasi Perpajakan

PENERIMAAN PAJAK BRUTO PER JENIS PAJAK YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS EKONOMI

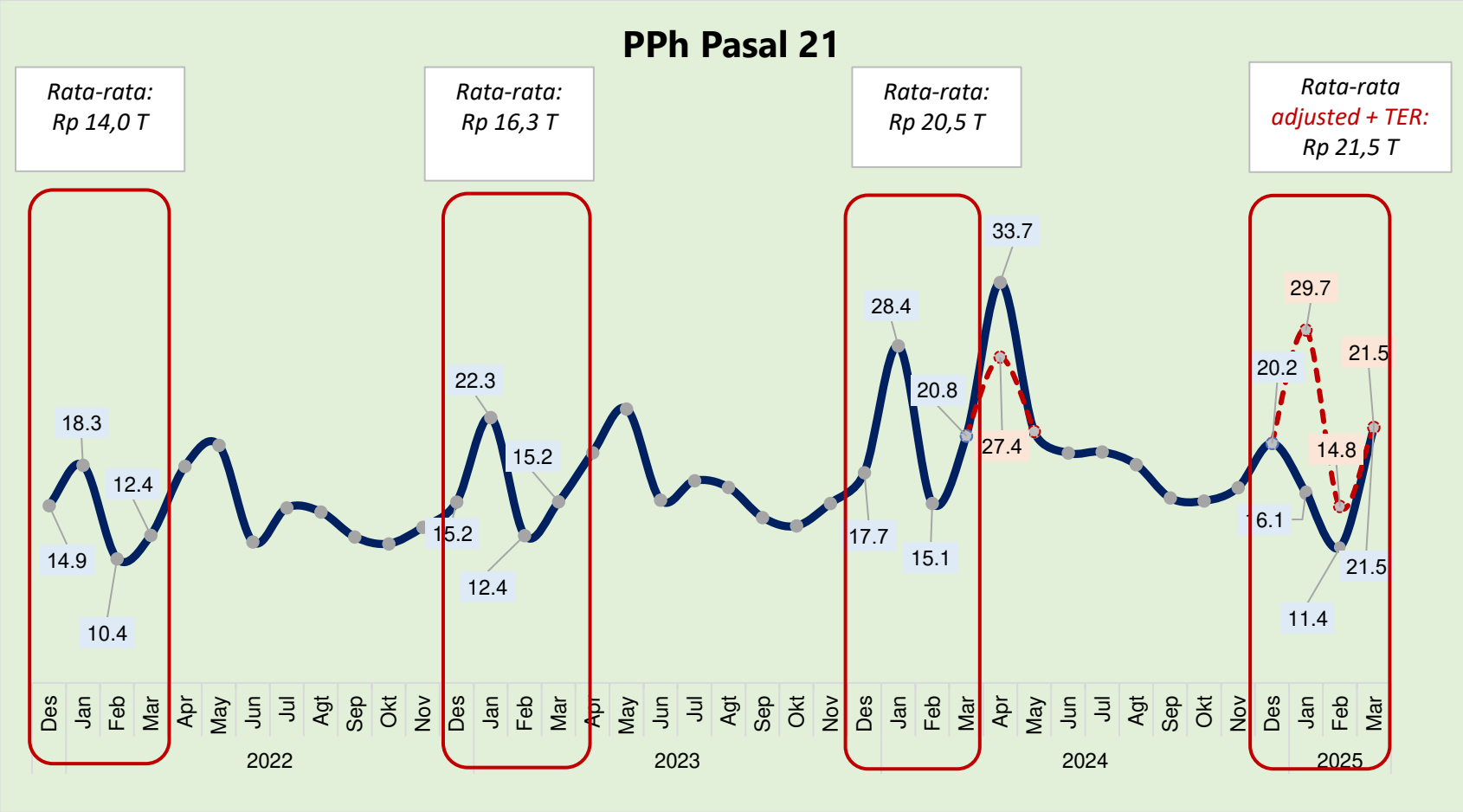

Penerimaan **PPh 21** bulan Maret 2025 membaik dengan pertumbuhan 3,3% yang didukung oleh:

- peningkatan penghasilan yang diterima oleh pegawai, serta
- berkurangnya wajib pajak yang mengkompensasikan kelebihan bayar PPh 21 tahun 2024 ke Masa Maret 2025, sebagaimana terjadi pada dua bulan sebelumnya

Reformasi Perpajakan

PENERIMAAN PAJAK BRUTO PER JENIS PAJAK YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS EKONOMI

PPh Pasal 25 Badan tumbuh baik sejalan dengan performa profitabilitas WP badan

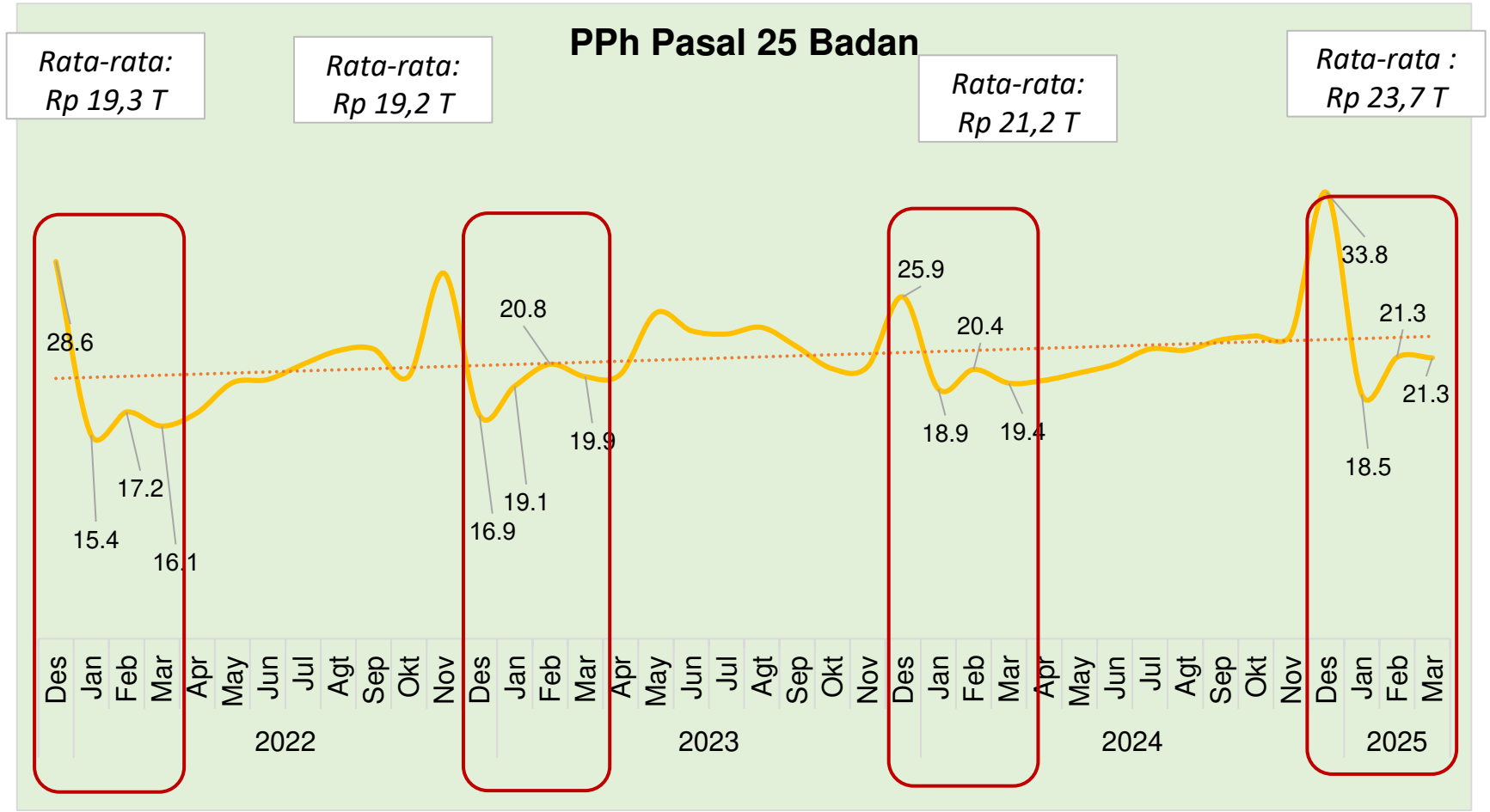

PPh Badan tumbuh baik secara kumulatif sejalan dengan performa profitabilitas yang baik pada WP Badan, terutama pada sektor pertambangan.

PENERIMAAN PAJAK BRUTO PER JENIS PAJAK YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS EKONOMI

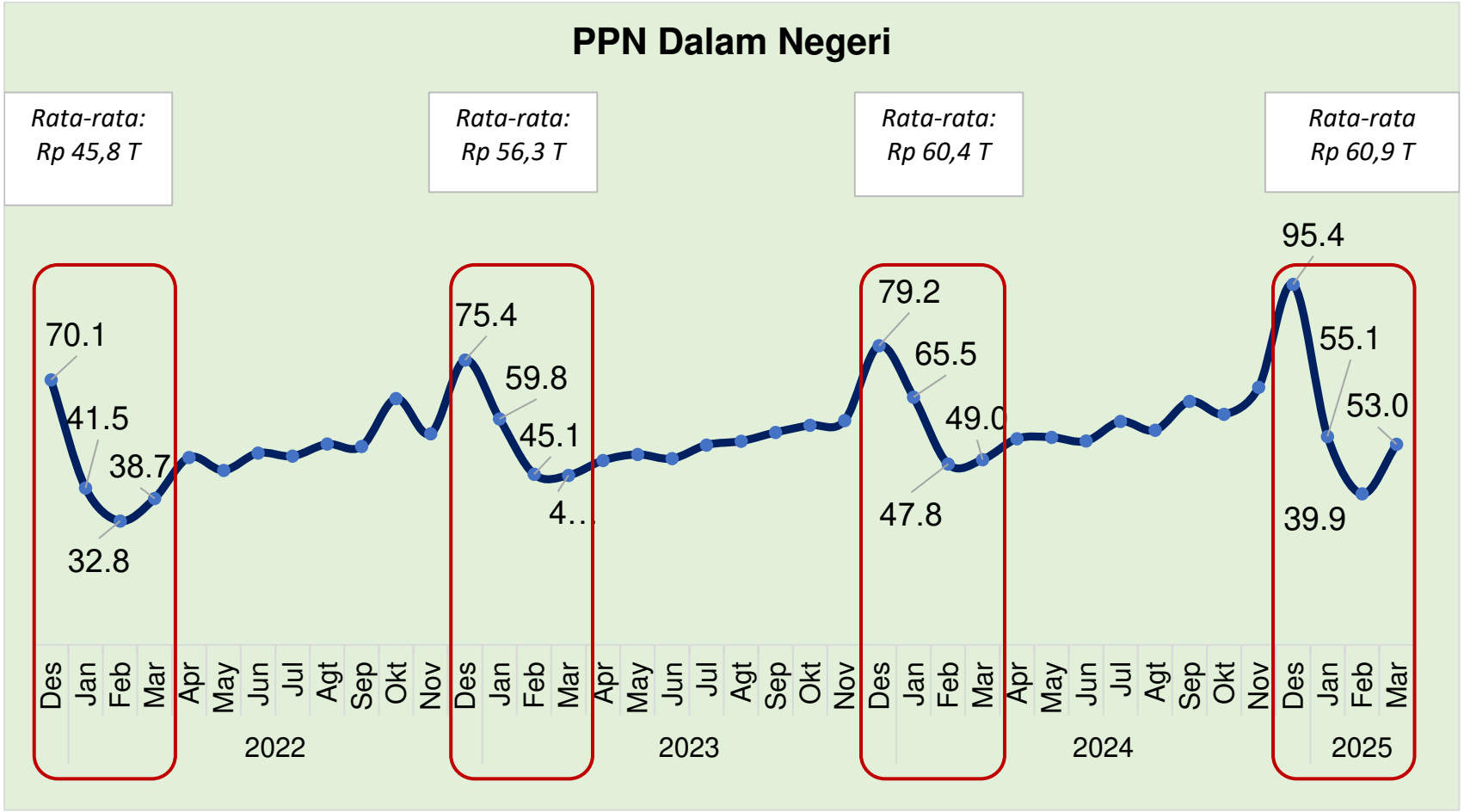

- Pada bulan Maret 2025, PPN DN mengalami *rebound* setelah dua bulan sebelumnya terkontraksi dengan tumbuh baik sebesar 8,0%.
- Rata-rata PPN DN periode Des-24 s.d. Mar-25 yaitu Rp 60,9 T, sedikit lebih tinggi (tumbuh 0,83%) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

PENERIMAAN PAJAK BRUTO PER JENIS PAJAK YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS EKONOMI

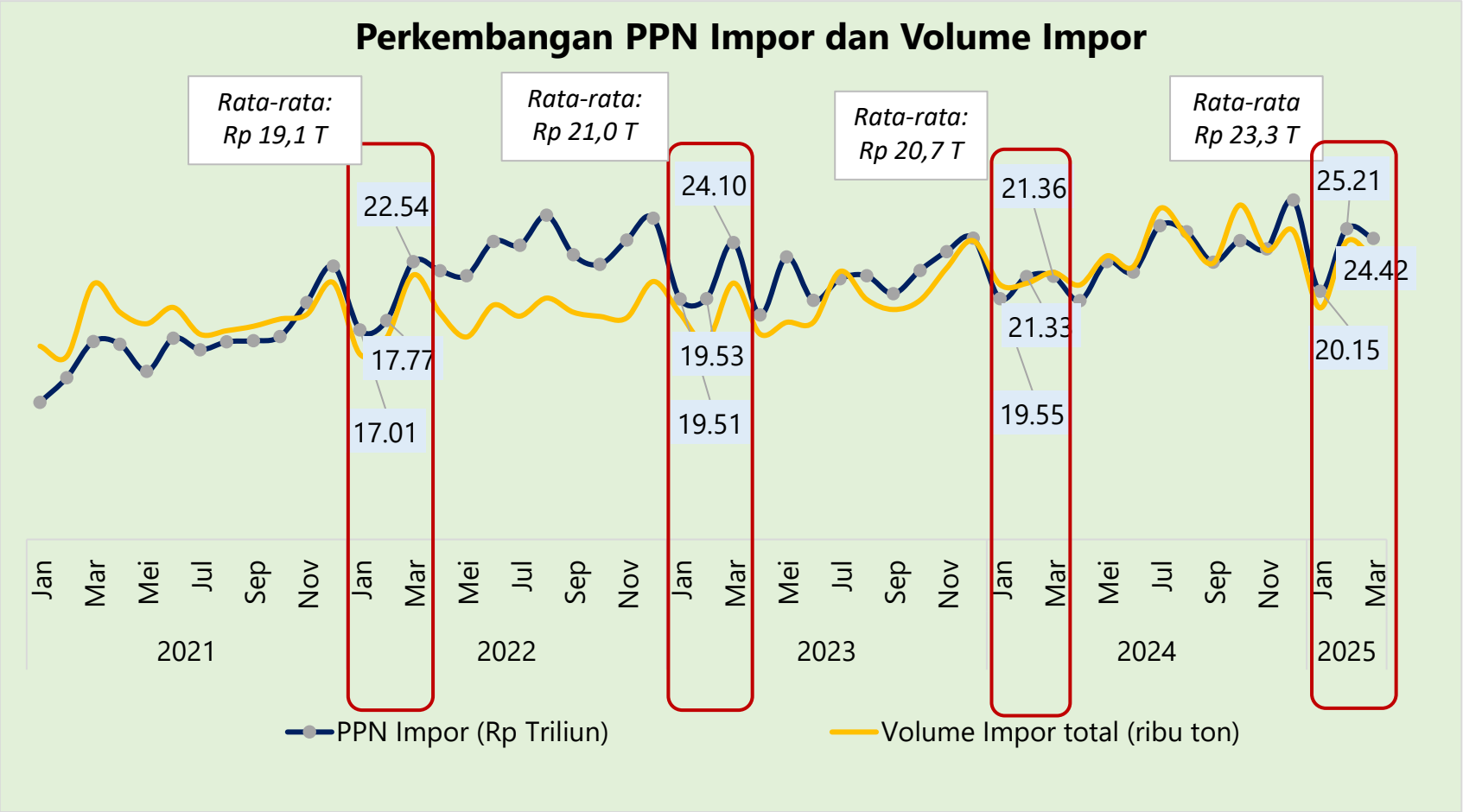

- **Realisasi PPN Impor** tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan volume impor migas dan non migas.
- Kinerja ini utamanya didukung oleh pertumbuhan Impor pada sektor Industri Pengolahan, khususnya pada subsektor:
  - Industri Kendaraan bermotor
  - Industri logam dasar
  - Industri kimia dan farmasi

Sumber: Tabel Dinamis BPS , diakses 25 April 2025

PENERIMAAN PAJAK BRUTO PER JENIS PAJAK YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS EKONOMI

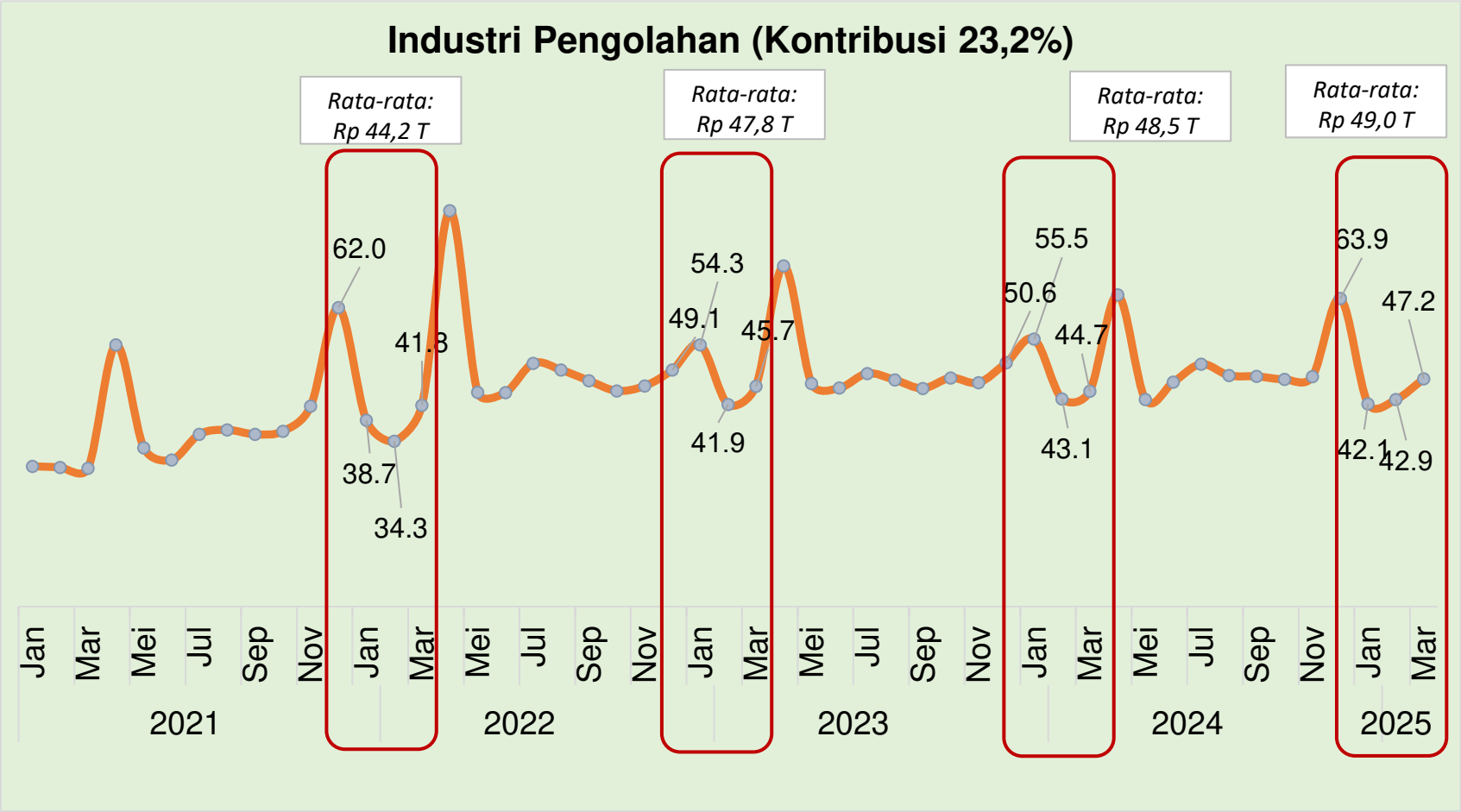

Rata-rata setoran periode Des-24 s.d. Mar-25 yaitu Rp 49,0 T, sedikit lebih tinggi (tumbuh 1,13%) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA DENGAN PENERIMAAN PAJAK TERBESAR

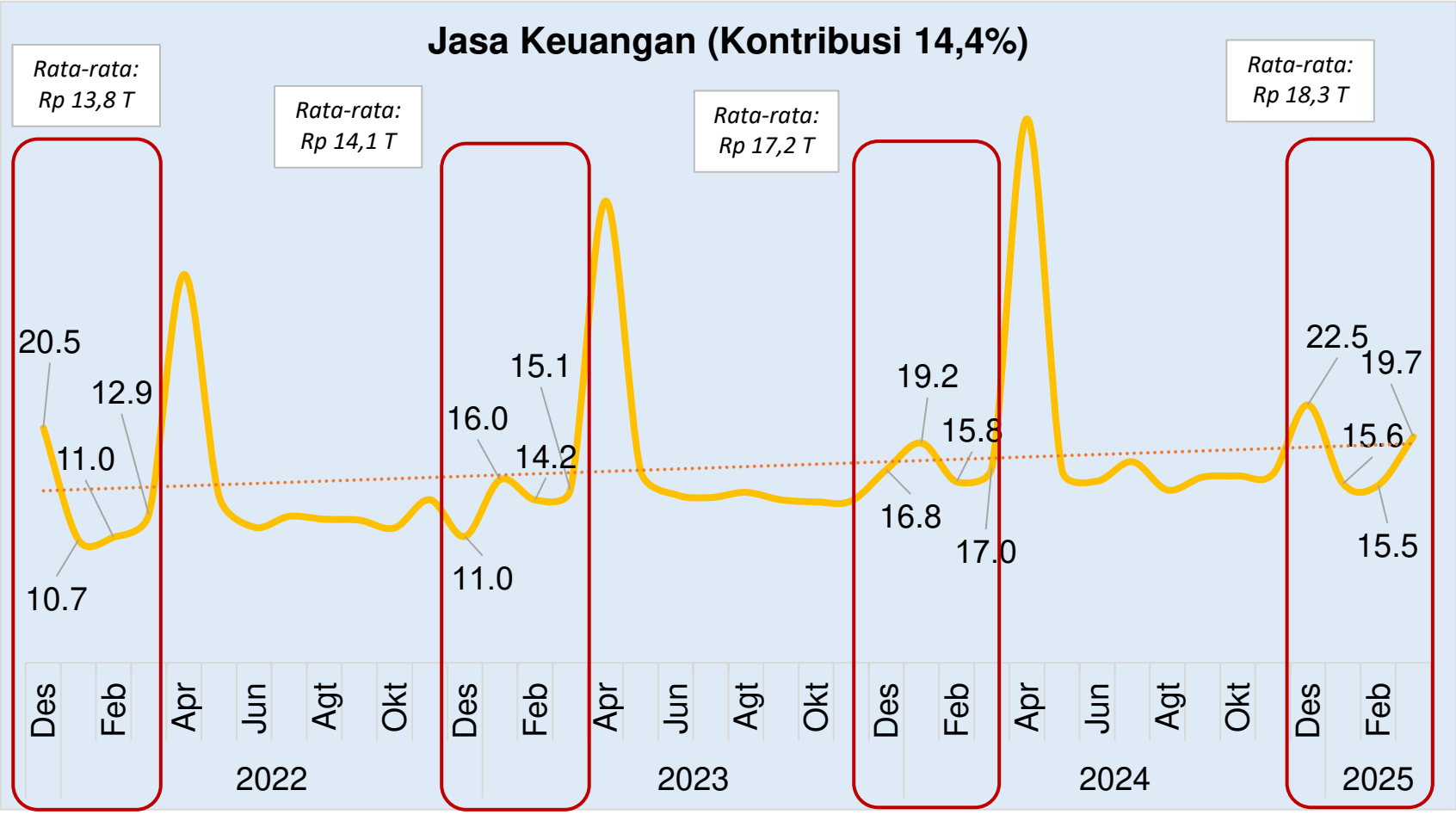

- **Sektor Jasa Keuangan** menunjukkan kinerja jangka panjang yang positif dan diharapkan akan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya.
- Rata-rata setoran periode Des-24 s.d. Mar-25 yaitu Rp 18,3 T, lebih tinggi (tumbuh 6,4%) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Reformasi Perpajakan

PENERIMAAN PAJAK BRUTO SEKTOR USAHA DENGAN PENERIMAAN PAJAK TERBESAR

Kinerja sektor Pertambangan tumbuh baik terutama pada subsektor bijih logam

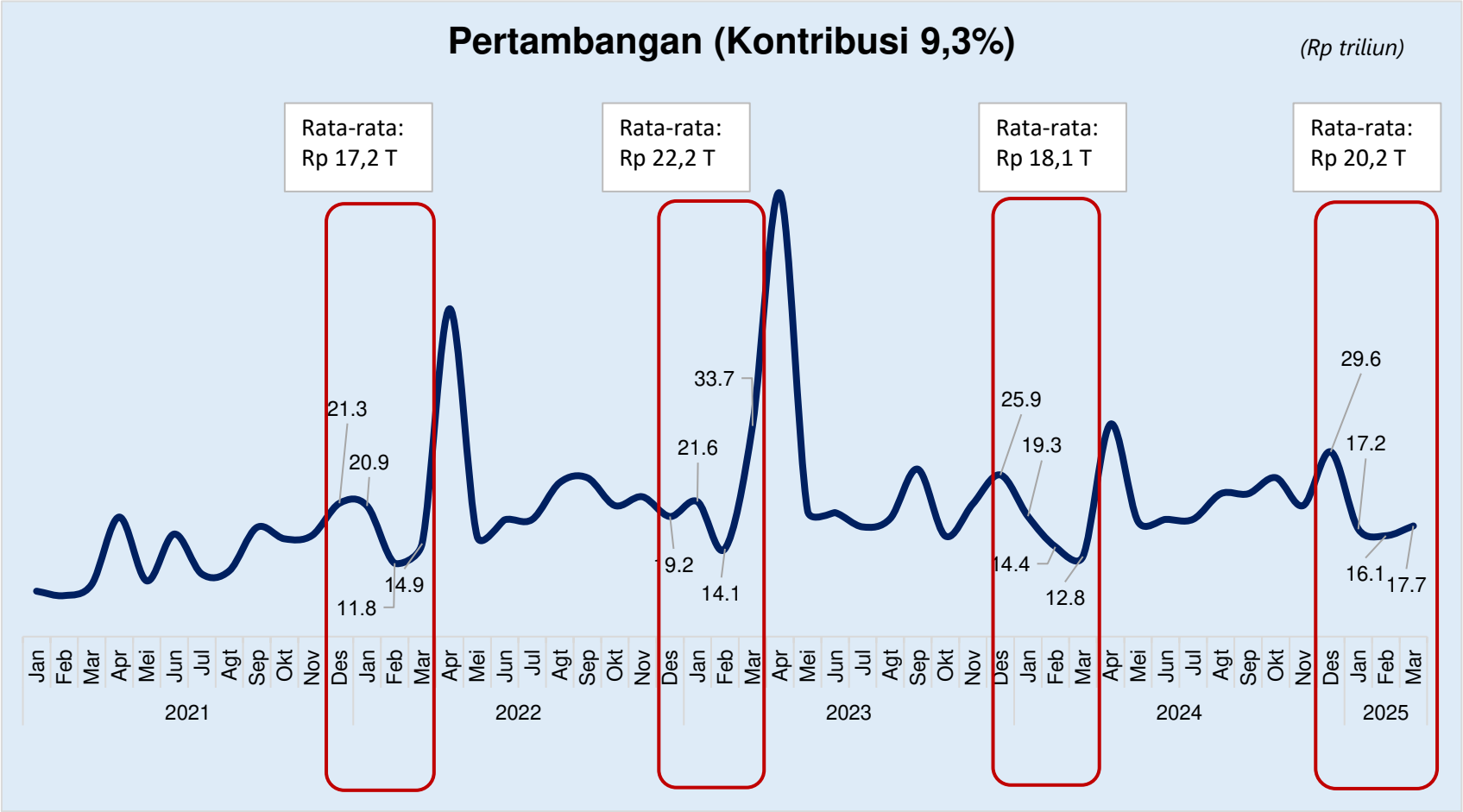

- **Sektor pertambangan tumbuh baik pada Januari s.d. Maret 2025** ditopang oleh kinerja subsektor pertambangan bijih logam khususnya tembaga yang impresif dan subsektor bijih logam mulia.
- Subsektor pertambangan bijih logam tumbuh impresif karena peningkatan setoran PPh badan akibat performa yang baik pada tahun lalu.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2025

Untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2025, pemerintah akan melaksanakan upaya strategis sebagai berikut:

01 **Memperluas basis perpajakan** melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

02 **Mendorong tingkat kepatuhan** melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum

03 **Menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional** untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan

04 **Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur** guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi

05 **Mendorong penguatan organisasi dan SDM** sejalan dengan dinamika perekonomian

PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN S.D. 30 APRIL 2025 PUKUL 23.59 WIB

Update Data : Rabu, 30 April 2025 23:59:56 WIB

Sumber: Tabel DB Monitoring SPT

No	Jenis WP	Wajib SPT 2025	Jumlah						
			2023	2024	2025	Δ 2024-2023	% 2024-2023	Δ 2025-2024	% 2025-2024
1	Badan	2,092,749	860,351	1,048,242	1,053,360	187,891	21.84%	5,118	0.49%
2	OP	17,688,042	12,290,790	13,159,400	12,999,861	868,610	7.07%	-159,539	-1.21%
	Total	**19,780,791**	**13,151,141**	**14,207,642**	**14,053,221**	**1,056,501**	**8.03%**	**-154,421**	**-1.09%**

Update Implementasi Coretax DJP

1. Update Progress Penanganan Insiden
2. Tindak Lanjut RDP Komisi XI 10 Februari 2025
   a. Roadmap Perbaikan Insiden Coretax DJP
   b. Dukungan Legacy System untuk Operasionalisasi Coretax DJP
   c. Peningkatan *cyber security* pada sistem Coretax DJP
   d. Relaksasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Penghapusan Sanksi Administratif)
3. Komunikasi Publik terkait Insiden Implementasi Coretax DJP
4. Progress Penerbitan Bukti Potong dan Faktur Pajak

1. Update Progress Penanganan Insiden

No	Tema Insiden	Deskripsi Insiden	Tindak Lanjut Penanganan Insiden	Status (RDP 10 Feb 2025)	Status (6 Mei 2025)
1.	*Login* dan Akses	Terdapat kendala terkait login dan akses Coretax yang disebabkan oleh: a. Kegagalan pada saat membuat kata sandi dengan karakter unik b. Email dan/atau nomor ponsel belum sama dengan basis data DJP c. Informasi terkait tata cara login/akses Coretax DJP masih perlu disebarluaskan	a. *Bugs fixing* oleh vendor untuk menampilkan notifikasi pengingat bagi WP terkait karakter unik yang dapat digunakan dalam pembuatan kata sandi b. Sosialisasi terkait tata cara login Coretax DJP terutama berkaitan dengan penggunaan data email dan nomor ponsel yang terdaftar pada basis data DJP	• Proses perbaikan • Latensi login dan akses 4,1 detik (4.100 *milliseconds*)	• Selesai perbaikan • Latensi *login* dan akses menjadi sekitar 0,001 detik (11 *millisecond*)
2.	Perubahan Data (update profile)	Terdapat kendala dalam melakukan perubahan data profile WP yang disebabkan oleh: a. *Bugs/error* saat penyimpanan data b. Data belum sepenuhnya tertampil (elemen data belum lengkap terisi) c. Informasi terkait tata cara perubahan profil dalam Coretax DJP masih perlu disebarluaskan	a. *Bugs fixing* oleh vendor agar *data update* dapat tersimpan dalam database b. Pembenahan basis data masterfile c. Sosialisasi terkait tata cara perubahan data secara mandiri (*voluntary*)	• Proses perbaikan • *Error* terkait perubahan data yang dilaporkan sekitar 397 kasus	• Selesai perbaikan • *Error* terkait perubahan data yang dilaporkan pada bulan Mei 2025 sebanyak 18 kasus

1. Update Progress Penanganan Insiden

No	Tema Insiden	Deskripsi Insiden	Tindak Lanjut Penanganan Insiden	Status (RDP 10 Feb 2025)	Status (6 Mei 2025)
3.	Kode Otorisasi DJP (KO)	Terdapat kendala dalam pembuatan tanda tangan elektronik (Kode Otorisasi DJP) yang disebabkan oleh *bugs/error* pembuatan Kode Otorisasi	*Bugs fixing* oleh vendor atas modul pemrosesan permohonan Kode Otorisasi DJP	• Proses perbaikan • *Error* terkait permintaan Kode otorisasi DJP sampai dengan 10 Feb 2025 sekitar 1.041 kasus	• Selesai Perbaikan • *Error* terkait permintaan Kode otorisasi DJP yang dilaporkan pada 1-6 Mei 2025 sebanyak 3 kasus
4.	*One Time Password* (OTP)	Terdapat kendala pengiriman *One Time Password* (OTP) yang disebabkan oleh tingginya traffic pengiriman OTP melalui provider (HP dan email)	Koordinasi dengan para *provider* untuk dilakukan improvement atas keterlambatan pengiriman OTP	• Proses perbaikan • Terdapat OTP yang terkirim di atas 5 menit (SLA 5 menit)	• Selesai Perbaikan • Saat ini OTP dapat terkirim dalam kurang dari 5 menit (SLA 5 menit)

1. Update Progress Penanganan Insiden

No.	Tema Insiden	Deskripsi Insiden	Tindak Lanjut Penanganan Insiden	Status (RDP 10 Feb 2025)	Status (6 Mei 2025)
5.	Penunjukan Penanggung Jawab (PIC), *Impersonate,* dan role access bagi pegawai	Terdapat kendala penunjukan PIC dan *impersonate* oleh PIC dan pihak lainnya selain PIC ke akun WP Badan yang disebabkan oleh belum dilakukannya pemutakhiran data PIC dan pihak lainnya dalam *profile* WP	Edukasi kepada WP agar melakukan pemutakhiran data profile WP Badan sesuai dengan data terkini dari Ditjen AHU	• Jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 3.281 kasus	• Jumlah kasus yang dilaporkan menurun signifikan menjadi sebanyak 41 kasus pada 1-6 Mei 2025
6.	Faktur Pajak	Terdapat kendala penerbitan faktur yang disebabkan oleh *bugs/error* pada saat upload faktur pajak dan *signing* faktur pajak yang menyebabkan tingginya latensi (waktu respon sistem)	*Bugs fixing* oleh vendor terkait upload dan skema *signing* faktur pajak	• Proses perbaikan • Latensi Faktur Pajak 9,8 detik (9.888 *milliseconds*)	• Selesai perbaikan • Latensi Faktur Pajak menjadi 0,3 detik (302 *millisecond*)

1. Update Progress Penanganan Insiden

No	Tema Insiden	Deskripsi Insiden	Tindak Lanjut Penanganan Insiden	Status (RDP 10 Feb 2025)	Status (6 Mei 2025)
7.	*Interoperabilitas*	Terdapat kendala interoperabilitas Coretax DJP dengan sistem lain antara lain sistem pada Ditjen Bea Cukai, LNSW, Dukcapil yang disebabkan oleh kegagalan validasi karena ketidaksesuaian data DJP dengan data eksternal dan terkendalanya aliran data antar entitas	Koordinasi aliran data dengan para pihak	Jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 1.244 kasus.	Jumlah kasus yang dilaporkan pada 1-6 Mei 2025 sebanyak 61 kasus.
8.	Aksesibilitas	Terdapat kendala akses Wajib Pajak dan pegawai ke Coretax DJP yang disebabkan oleh performa kapasitas infrastruktur	• Peningkatan kapasitas *bandwidth* dan *server* • *Tuning database* dan infrastruktur sehingga akses ke Coretax DJP menjadi lebih efisien	• Kapasitas *bandwidth* sebesar 9 Gbps • Rata-rata latensi untuk *login*, faktur, SPT, pendaftaran, bukti potong 12,6 detik (12.600 *milliseconds)*	• Kapasitas *bandwidth* ditambah menjadi 18 Gbps • Rata-rata latensi untuk login, faktur, SPT, pendaftaran, bukti potong 0,192 detik (192 *milliseconds)*

1. Update Progress Penanganan Insiden

No	Tema Insiden	Deskripsi Insiden	Tindak Lanjut Penanganan Insiden	Status (RDP 10 Feb 2025)	Status (6 Mei 2025)
9.	e-Bupot	Terdapat kendala dalam pembuatan e-Bupot yang disebabkan oleh NIK Wajib Pajak belum teregister di Coretax DJP (Wajib Pajak belum melakukan pemadanan NPWP dan NIK)	a. Sosialisasi terkait pemadanan NPWP dan NIK b. Perbaikan sistem terkait pembuatan e-Bupot	• Proses perbaikan • Latensi pembuatan e-Bupot 16 detik (16.000 *millisecond)*	• Selesai perbaikan • Latensi pembuatan e-Bupot 0,434 detik (434 *milisecond)*

1. Update Progress Penanganan Insiden (Periode 10 Februari s.d. 7 Mei 2025)

No	Tema Insiden	Deskripsi Insiden	Tindak Lanjut Penanganan Insiden	Status
1.	SPT Masa PPN	Terdapat kendala pembuatan SPT Masa PPN untuk Wajib Pajak dengan jumlah faktur pajak di atas 10.000 faktur yang disebabkan oleh *logic pre-filing* dalam aplikasi yang belum efisien	• Penyempurnaan logic pre-filing dalam aplikasi serta penambahan fitur posting untuk dapat memfasilitasi proses prepopulasi faktur pajak dengan jumlah berapapun dalam SPT Masa PPN	• Selesai perbaikan • Latensi untuk prepopulasi di atas 10.000 faktur berkisar 0,2-54 detik
2.	Proses Pencatatan transaksi	Terdapat kendala proses pencatatan transaksi yang disebabkan oleh: a. Kapasitas infrastruktur *b. Error* terkait pencatatan transaksi yang perlu divalidasi dengan dokumen lain dalam sistem	a. Penyediaan *server* khusus untuk proses pencatatan transaksi b. Perbaikan aplikasi terkait dengan pencatatan transaksi	a. Dalam proses penambahan server b. Perbaikan aplikasi telah selesai

2. TINDAK LANJUT RDP KOMISI XI 10 FEBRUARI 2025

a. Roadmap Perbaikan Coretax DJP
b. Dukungan Legacy System untuk Operasionalisasi Coretax DJP
c. Peningkatan Cyber Security pada sistem Coretax DJP
d. Relaksasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Penghapusan Sanksi Administratif)

2.a Roadmap Perbaikan Insiden Coretax DJP

Area	Ruang Lingkup	Jadwal Penyelesaian
Aplikasi	Perbaikan *bugs/error* Coretax DJP yang melingkupi 21 proses bisnis	**<u>Sudah Selesai:</u>** 1. *Business Intelligence* 2. *Knowledge Management* 3. Data Pihak Ketiga 18 Proses bisnis lainnya dalam proses perbaikan (dijadwalkan selesai pada 31 Juli 2025)
Data	*Incremental data migration* sebagai dampak dukungan *legacy system* terhadap Coretax DJP tetap harus dilakukan untuk menjamin: a. ketersediaan seluruh elemen data di Coretax DJP b. kelancaran layanan selama proses migrasi	**31 Desember 2025**
Infrastruktur	Peningkatan performa sistem melalui: 1. *Tuning logic* aplikasi 2. *Tuning* konfigurasi infrastruktur 3. Peningkatan kapasitas *networking, database, storage*	**31 Juli 2025**

2.b Dukungan *Legacy System* untuk Operasionalisasi Coretax DJP

Legacy system digunakan sementara dan terbatas untuk beberapa area sebagai berikut:

- Penerbitan faktur pajak melalui e-Faktur *Desktop* (KEPDIRJEN PAJAK Nomor 24/PJ/2025 sttd 54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025)
- Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan s.d. Tahun Pajak 2024 (DJP *Online*)
- Proses bisnis Pengawasan Wajib Pajak untuk tahun pajak s.d. 2024
- Proses bisnis Pemeriksaan Wajib Pajak untuk tahun pajak s.d. 2024
- Proses bisnis Penyidikan Wajib Pajak untuk kasus yang dimulai sebelum 1 Januari 2025

2.c Peningkatan *Cyber Security* pada sistem Coretax DJP

djp

KEMENTERIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Asesmen aspek keamanan sistem oleh Pusintek Kementerian Keuangan dan BSSN

a. Hasil asesmen :
Masih terdapat celah keamanan sistem Coretax DJP yang perlu ditutup

b. Status
Sudah ditindaklanjuti oleh DJP

2.d Relaksasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Penghapusan Sanksi Administratif)

Telah diberikan **relaksasi** atas pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP berupa **penghapusan sanksi administratif** melalui penerbitan **KEPDIRJEN PAJAK Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025**

AREA KEBIJAKAN RELAKSASI	JENIS PAJAK	MASA PAJAK	Jatuh tempo sebelum relaksasi	Jatuh tempo setelah relaksasi
1 **Pembayaran atau Penyetoran Pajak**	PPh Ps. 4 ayat (2), PPh Ps. 15, PPh Ps. 21 , PPh Ps. 22, PPh Ps. 23, PPh Ps. 25, dan PPh Ps. 26	Januari 2025	tanggal 15 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya
	PPh Ps. 4 ayat (2) atas PPHTB	Desember 2024 & Januari 2025		
	PPN & PPNBM	Januari 2025	28 Februari 2025	10 Maret 2025
	Bea Meterai	Desember 2024 & Januari 2025	tanggal 15 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya
2 **Pelaporan SPT Masa**	Pasal 21 dan/atau Pasal 26, dan Unifikasi	Januari s.d. Maret 2025	tanggal 20 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya
	PPh Ps. 4 ayat (2) atas PPHTB	Desember 2024 s.d. Maret 2025		
	PPh Ps. 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dan PPh Ps. 25	Januari s.d. Maret 2025		
	PPN	Januari s.d. Maret 2025	akhir bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal jatuh tempo
	Bea Meterai	Desember 2024 s.d. Maret 2025	tanggal 20 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya

3. Komunikasi Publik terkait Insiden Implementasi Coretax DJP

Tujuan:
- ❑ Menjaga transparansi mengenai perkembangan sistem Coretax DJP.
- ❑ Meningkatkan pemahaman WP mengenai perubahan sistem dan prosedur pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.
- ❑ Mencegah penyebaran informasi yang keliru dengan menyediakan berbagai saluran komunikasi yang dimiliki DJP.

1

Penyediaan laman khusus Coretax DJP di Situsweb Pajak

www.pajak.go.id/coretax/

Memuat berbagai informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak:
- ❑ Informasi Proses Bisnis hasil rancang ulang
- ❑ E-book Panduan Ringkas Coretax DJP
- ❑ E-book Tutorial Coretax DJP
- ❑ Keterangan Tertulis dan Siaran Pers
- ❑ FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

2

Penyampaian Informasi Melalui Sosial Media

Intormasi terkini dan video tutorial Coretax DJP secara rutin disampaikan melalui akun sosial media DJP seperti:
Instagram, X, LinkedIn, dan Youtube DJP

3. Komunikasi Publik terkait Insiden Implementasi Coretax DJP

Melalui **Keterangan Tertulis (KT)** masyarakat mendapatkan penjelasan langsung dari sumber resmi dan akurat.

KT-02/ 2025
Implementasi Coretax DJP
10-Jan-25

KT-03/ 2025
Perkembangan Coretax DJP
13-Jan-25

KT-04/ 2025
Pembaruan Informasi Pasca Implementasi Coretax DJP
22-Jan-25

KT-05/ 2025
Pembaruan Informasi Terkini Implementasi Coretax DJP
4-Feb-25

KT-06/ 2025
Penerbitan Faktur Pajak
13-Feb-25

KT-07/ 2025
Pembaruan Informasi Terkini Penerbitan Faktur Pajak
19-Feb-25

KT-08/ 2025
Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Implementasi Coretax
20-Feb-25

KT-09/ 2025
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Sehubungan Dengan Implementasi Coretax DJP
25-Feb-25

KT-10/ 2025
Perkembangan Informasi Terkini Implementasi Coretax DJP
28-Feb-25

KT-11/ 2025
Perkembangan Informasi Terkini Implementasi Coretax DJP
18-Mar-25

KT-12/ 2025
Perkembangan Informasi Terkini Implementasi Coretax DJP
23-Apr-25

Keterangan Tertulis dapat diunduh di Situsweb Pajak
www.pajak.go.id/coretax/

3. Komunikasi Publik terkait Insiden Implementasi Coretax DJP

Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan	Sasaran	Ket.
E-learning bekerjasama dengan Pusdiklat Pajak [KCOC (Kemenkeu Corpu Open Class)]	▪Bendahara Instansi Pemerintah ▪Pegawai DJP	▪KCOC series I (Viewer = 49.000) ▪KCOC series II (Viewer= 62.000)
Bimbingan Teknis Imlementasi Coretax DJP Kepada Bendahara Instansi Pemerintah, Bendahara Desa, Pemda dan Kementerian/Lembaga	Bendahara Instansi Pemerintah	12 Instansi Bendahara Desa 32 Kementerian / Lembaga 8 Bendahara Daerah 3 Bendahara Kelurahan 60 Bendahara KP
Pendampingan Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan PT Taspen	PT TASPEN	Salah satu WP dengan output 1721 A1 dan 1721 A2 terbesar
Sosialisasi dan Simulasi Pengisian SPT Masa Januari 2025 melalui Aplikasi Coretax DJP	Pengurus dan Anggota PERTAPSI	1000 peserta via daring (Zoom)
Sosialisasi Penggunaan Akses Informasi Keuangan (AIK) Coretax DJP	Lembaga Keuangan dan Asosiasi Perbankan	1000 peserta via daring (Zoom)
Bimbingan Teknis Coretax DJP Kepada Kantor Perwakilan Luar Negeri	Perwakilan Kantor Perwakilan Luar Negeri	170 peserta via daring (Zoom)

3. Komunikasi Publik terkait Insiden Implementasi Coretax DJP

Pemenuhan Permintaan Audiensi dan Edukasi

Follow Up Action	Sasaran	Keterangan
Pemenuhan Permintaan Kegiatan Audiensi, Forum Group Discussion (FGD), dan Edukasi kepada Asosiasi, Konsultan Pajak, dan Tax Center, Perbankan, Kementerian /Lembaga, dan pihak eksternal lainnya	1. **33 Asosiasi** dengan jumlah peserta ±1650 2. **4 Konsultan Pajak** dengan jumlah peserta ±2.700 3. **Tax Center** dengan jumlah peserta ±1.115 4. **21 Instansi Pemerintah**: dengan jumlah peserta ±700 5. **21 Swasta/Lainnya** dengan jumlah peserta ±1.050	**Asosiasi:** KADIN, APINDO, HIPMI, Himbara, Perbanas, IdEA, GAPMMI, HIPPINDO, HIPMIIKINDO, APMIKIMMDO, APLI, AKI, APPSI, ARDIN, PERSI, PERBARINDO, GAIKINDO, API, PERKOSMI, GP FARMASI, ASI, GIAMM, AKUMANDIRI, AKUMINDO, PERPIT, PERTAPSI, REI, INTI, ASPIMTEL, GAPKI, FORBAKTI, HIPELKI, AAUI, ASOSIASI EMITEN INDONESIA, AITI, Asosiasi Asuransi Jiwa **Konsultan Pajak:** IKPI, AKP2I, P3KPI, PERKOPPI **Tax Center:** IKAFEB USAKTI, IKAPRAMA, LIT,PKN STAN, UI, STIAMI, UNJ, Univ Pamulang, Gunadarma, dll **Instansi Pemerintah:** TASPEN, LAN RI, Kemen ESDM, Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Kelautan, Kementerian Perindustrian, Badan Geospasial, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPPK, Kemenkes, Kementerian Kehutanan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemenaker, Bawaslu RI, Pusdiklat AP, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan **Swasta/Lainnya:** DDTC, PwC, EY, Taxindo Prime, KPMG, PB Taxand, Solusi Anak Negeri, CTBC, Amalgated Consulting Indonesia, CITIBANK, Bank Capital, Garda Bina Utama, Bank Ina, PT Gunatronikatama Cipta, Gunatronikatama Cipta, Jababeka, Perusahaan Pelayaran, Sarana Multi Infrastruktur, Kafegama80

Komunikasi Internal terkait Insiden Implementasi Coretax DJP

Tujuan:
- ❑ Meningkatan kapasitas pegawai terhadap implementasi Coretax DJP.
- ❑ Mengakselerasi dan menyamakan persepsi pegawai dengan informasi dan pemahaman yang tepat.
- ❑ Menyeragamkan pemberian prosedur layanan sehingga Wajib Pajak menerima standar yang sama di semua unit kerja DJP.

1

Portal Intranet
https://reformdjp.intranet.pajak.go.id

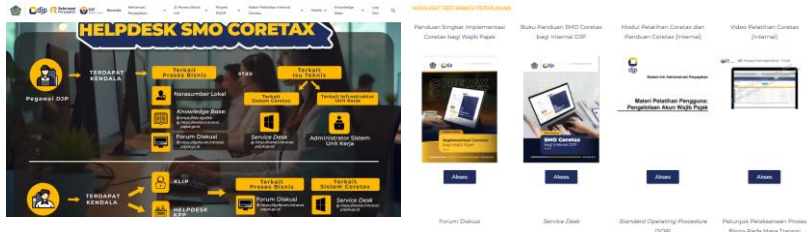

2

DJP Forum
Forum diskusi pegawai DJP

3

***Townhall Meeting* dan Sosialisasi Internal**
Penyampaian Informasi tentang penyesuaian Coretax DJP dari Pimpinan DJP kepada seluruh pegawai

4

Grup Pesan Instan Pegawai
Berbagai fungsi/rumpun jabatan

5

Newsletter
Penyampaian Informasi melalui media newsletter ke email pegawai

6

Bimbingan Teknis
Peningkatan Kapasitas Teknis Pegawai

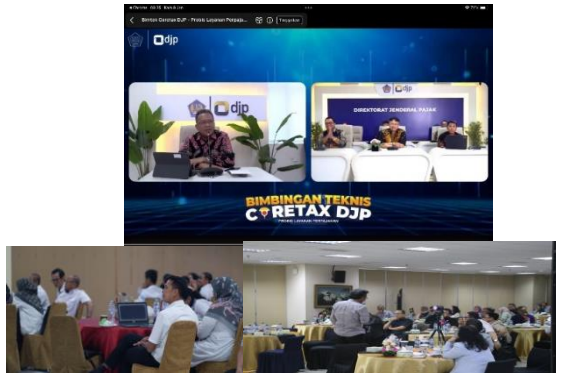

Reformasi Perpajakan

4. Progress Penerbitan Bukti Potong dan Faktur Pajak

Penerbitan Bukti Potong dan Faktur Pajak Masa Pajak Januari s.d Maret

Penerbitan Bukti Potong

Masa Pajak	2024	2025
Januari	24,055,812	25,084,612
Februari	24,709,384	25,358,107
Maret	26,600,285	26,332,923

Penerbitan Faktur Pajak

Masa Pajak	2024	2025
Januari	65.890.989	60,328,483
Februari	62.176.287	64,264,779
Maret	66,479,490	62,551,880

Terima Kasih

Salam Satu Bahu

©2025 Direktorat Jenderal Pajak